



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN KETUA DPR RI  
PADA SILATURAHMI PIMPINAN DPR RI,  
DIDAMPINGI PIMPINAN KOMISI-KOMISI DAN BADAN-BADAN DPR RI DENGAN  
MENKO POLHUKAM, MENKO EKUIN DAN MENKO KESRA SERTA  
PARA MENTERI KABINET INDONESIA BERSATU II  
RUANG PUSTAKALOKA GEDUNG NUSANTARA IV**

**SELASA, 10 NOVEMBER 2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2009**

**SAMBUTAN KETUA DPR RI  
PADA SILATURAHMI PIMPINAN DPR RI,  
DIDAMPINGI PIMPINAN KOMISI-KOMISI DAN BADAN-BADAN DPR RI DENGAN  
MENKO POLHUKAM, MENKO EKUIN DAN MENKO KESRA SERTA  
PARA MENTERI KABINET INDONESIA BERSATU II**

**SELASA, 10 NOVEMBER 2009**

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***  
**Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat,**

- Para Wakil Ketua DPR RI;**
- Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI;**
- Para Menteri Koordinator, dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;**

**Hadirin yang berbahagia,**

Pertama-tama, marilah kita mempersembahkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya-lah kita semua diberikan kesehatan yang baik untuk dapat hadir pada silaturahmi malam hari ini. Pertemuan malam hari ini adalah pertemuan pertama antara DPR RI dengan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk itu, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada baiknya, pada forum yang berbahagia ini, saya perkenalkan terlebih dahulu para Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI yang hadir pada malam hari ini, terdiri dari Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan-badan DPR. Di jajaran Pimpinan DPR RI, terdiri dari:

- Saudara Drs. H. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- Saudara Ir. H. Pramono Anung Wibowo, MM, Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan;
- Saudara Dr. Marwoto Mitrohardjono, SE., MM., Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- Saudara H.M. Anis Matta, Lc., Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Selanjutnya, kami persilakan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPR untuk memperkenalkan diri, dengan menyebutkan ruang lingkup tugasnya masing-masing.

### **PERKENALAN**

(DIMULAI DARI KOMISI I SAMPAI DENGAN XI, DILANJUTKAN  
DENGAN BALEG, BADAN KEHORMATAN, BKSAP,  
BADAN ANGGARAN, BURT DAN BAKN)

#### **Hadirin yang berbahagia,**

Pertemuan ini bertujuan untuk membangun kerja sama dan komunikasi yang intensif serta saling bertukar informasi yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas baik dari sisi kedewanan maupun dari sisi pemerintahan. Hal ini sangat penting mengingat lima tahun ke depan, dua lembaga ini bertekad untuk bekerja maksimal bagi kepentingan rakyat, mensejahterakan masyarakat, membangun demokrasi agar berproses lebih baik dan mewujudkan keadilan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa pada bulan Oktober lalu, alat-alat kelengkapan DPR telah terbentuk, setelah melalui keputusan Badan Musyawarah (Bamus) berbagai alat kelengkapan Dewan telah mengagendakan untuk melakukan

rapat-rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan pasangan kerjanya masing-masing dalam rangka mengemban ketiga fungsi utama Dewan.

Dalam agenda kerja komisi-komisi Dewan, ada keinginan dari alat kelengkapan Dewan memaksimalkan fungsi dan tugasnya, melalui rapat-rapat kerja dengan para menteri dan bahkan ada usulan untuk mengadakan rapat kerja dengan menko. Sehubungan dengan itu, hal ini telah dibawa di dalam rapat Bamus. Dalam Tata Tertib di masa keanggotaan DPR yang lalu, hal ini tidak menjadi agenda, karena komisi-komisi lebih menitikberatkan pelaksanaan tugasnya dengan para menteri pasangan kerjanya masing-masing. Atas gagasan perlunya rapat dengan para Menko ini, rapat Bamus tanggal 5 November 2009 telah memutuskan, **Menyetujui rapat-rapat komisi dengan para Menko**, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Rapat Komisi dengan para Menko hanya dapat dilaksanakan apabila membicarakan substansi permasalahan yang **sifatnya lintas sektoral** dan dilaksanakan dalam Rapat Gabungan Komisi sesuai dengan pasal 228 Peraturan Tata Tertib DPR RI yang diantar oleh Pimpinan DPR dan dipimpin oleh Pimpinan gabungan komisi;
- 2) Rapat komisi dengan Menko dapat pula dilaksanakan melalui **Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI** dengan melibatkan Pimpinan komisi-komisi terkait;
- 3) Jika dipandang perlu oleh Pimpinan DPR maka komisi dapat mengadakan Rapat Kerja dengan Menko untuk **membahas fokus atau masalah tertentu** setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR RI.

Oleh karena itu, pertemuan malam ini sebagai awal dari rencana realisasi bagi berlangsungnya rapat kerja antara DPR dengan para Menko.

## **Hadirin yang berbahagia,**

Sebelum Dewan mendengarkan tanggapan dari para Menko terhadap mekanisme tersebut di atas, ada baiknya dalam forum ini kami menginformasikan upaya dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh DPR RI dalam rangka **peningkatan citra** untuk lima tahun ke depan. DPR hasil pemilu 2009 bertekad untuk mengubah citra DPR menjadi lembaga yang benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Kesungguhan, semangat, dan tekad untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya datang dari pimpinan Dewan, pimpinan fraksi-fraksi, juga oleh Pimpinan alat kelengkapan Dewan dan para anggota Dewan. Pencitraan antara lain tidak hanya dilakukan dengan penerapan disiplin, tetapi yang lebih penting adalah penguatan peran dari masing-masing fungsi Dewan dengan mekanisme dan prosedur kerja yang lebih terarah.

**Fungsi legislasi** akan lebih difokuskan. Baleg secepatnya menyelesaikan Prolegnas untuk periode lima tahun dan program prioritas tahunan RUU. Kepada para Menko diharapkan untuk dapat berkoordinasi dengan para menteri yang memimpin departemen di jajarannya untuk mempersiapkan RUU yang perlu diusulkan untuk dimasukkan di dalam Prolegnas lima tahunan dan prioritas tahunan. Banyak sekali RUU yang belum dapat diselesaikan oleh DPR hasil pemilu 2004, baik RUU yang datang dari pemerintah maupun atas inisiatif DPR. Hal ini mengingat di DPR tidak ada aturan mengenai *carry-over* terhadap pembahasan RUU, maka kesemua RUU tersebut harus dibahas dari awal lagi.

Dalam kaitannya dengan penanganan RUU, apabila dalam perkembangan pembahasannya terdapat multitafsir diantara anggota pansus/komisi dengan pemerintah, maka diwacanakan untuk melakukan "konsultasi informal" kepada mahkamah Konstitusi, agar mendapatkan kesepahaman bersama.

**Fungsi pengawasan**, diletakkan dalam kerangka pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara, melalui mekanisme *checks and balances*.

Dalam pelaksanaan **fungsi anggaran**, Dewan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Anggaran (BA), tentunya melalui koordinasi dengan komisi-komisi DPR. Lain dengan komisi-komisi DPR, khusus mengenai Badan Anggaran, keanggotaannya lebih besar (85 orang), yang datang dari komisi-komisi Dewan. Diharapkan badan ini dapat melaksanakan fungsinya sesuai amanat UUD 1945. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan baru DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui telaahan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dapat membantu komisi-komisi Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, menterjemahkan Hapsem BPK, agar tata kelola sistem keuangan negara dapat dijalankan sesuai dengan amanah UU.

Dalam kaitannya dengan dengan fungsi anggaran, ada keinginan membentuk semacam "**budget office**" yang didukung penuh oleh para ahli, agar dalam pembahasan RAPBN dengan pemerintah ada kesetaraan, baik pada saat pembicaraan awal yang bersifat kualitatif (pembicaraan pendahuluan RAPBN), maupun pada saat pembahasan RUU APBN yang telah dalam bentuk Nota Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan dengan pengantar presiden.

**Hadirin yang terhormat,**

Gedung DPR adalah rumah rakyat. Sekarang ini ada gagasan adanya satu hari dalam satu masa sidang yang disebut "Hari Rakyat". Hal ini dimaksudkan untuk membangun karakter anggota DPR untuk lebih banyak menyerap aspirasi rakyat. DPR akan lebih progresif dalam menterjemahkan aspirasi rakyat, ada gagasan terbukanya forum "Rakyat Bertanya DPR Menjawab". Mekanisme tentang gagasan ini masih akan didalami lebih lanjut.

Dalam rangka pencitraan DPR itulah, Pimpinan DPR sepakat untuk mengikutsertakan para anggota Dewan untuk ikut *training Emotional Spiritual Quotient (ESQ)*. *Training* ini dimaksudkan agar para anggota mendapatkan pencerahan dan keyakinan untuk menemukan jati diri melalui sentuhan nilai-nilai asasi. Persoalan bangsa sekarang ini adalah masalah dekadensi moral. Untuk itu, pelatihan ini merupakan salah satu solusi.

Selanjutnya, kami mempersilakan kepada Mensesneg Bapak Sudi Silalahi untuk memperkenalkan para menteri dan memberikan tanggapan-tanggapan.

**PERKENALAN DAN TANGGAPAN  
DARI MENSESNEG**

**Hadirin yang berbahagia,**

Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan acara silaturahmi ini dapat berlangsung dengan lancar. Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, kami menutup silaturahmi ini.

***Billahittaufiq wal hidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 10 November 2009

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

  
**H. MARZUKI ALIE**